

# TATA KELOLA KELEMBAGAAN KELOMPOK TANI HUTAN MALAKA 01 HUTAN KEMASYARAKATAN DI DESA CENRANA BARU KECAMATAN CENRANA KABUPATEN MAROS

*(Institutional Governance of The Malacca Forest Farmers Group 01 Community  
Forestry in The New Cenrana Village Cenrana Sub-District Maros District)*

MUSDALIFAH<sup>1</sup>✉, YUSRAN<sup>1</sup>, ADRAYANTI SABAR<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Kehutanan, Fakultas Kehutanan, Universitas Hasanuddin, Jl. Perintis Kemerdekaan No.KM.10, Tamalanrea Indah, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90245

✉Penulis Korespondensi: Email [ifaamusdalifah76@gmail.com](mailto:ifaamusdalifah76@gmail.com)

Diterima: 07 Jan 2023 | Disetujui: 23 Mar 2023

**Abstrak.** Keberadaan Kelompok Tani Hutan dinilai sangat penting, karena dapat meningkatkan kapasitas kelembagaan pada pengelolaan hutan kemasyarakatan yang berfungsi untuk mengontrol dan mengawasi pengelolaan hutan agar tetap lestari. Salah satunya KTH Malaka 01 yang telah mendapatkan persetujuan usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pelaksanaan tata kelola kelembagaan dan menganalisis faktor pendorong dan faktor penghambat pengelolaan HKm. Penelitian ini dilakukan pada bulan April hingga Mei 2022 di kawasan hutan kemasyarakatan desa cenrana baru. Pengumpulan data dilakukan menggunakan wawancara, observasi, dan studi dokumentasi yang kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif. Data diperoleh diidentifikasi melalui tabel kriteria dan indikator penilaian kemampuan tata kelola, kemudian dianalisis melalui metode *Force Field Analysis* (FFA) dan *Analysis Hierarki Process* (AHP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tata kelola kelembagaan KTH Malaka 01 dikategorikan tidak baik atau dikatakan masih belum optimal dilakukan, hal ini dilihat berdasarkan tiga aspek, yaitu kelola kelembagaan, kawasan, dan usaha. Faktor pendorong pengelolaan HKm terdiri atas persetujuan IUPHKm, struktur kepengurusan kelompok, pengetahuan pendamping, potensi jasa lingkungan, sarana prasarana yang mendukung, dan keinginan untuk bermitra. Faktor penghambat terdiri atas pertemuan KTH tidak rutin, pendamping tidak aktif, partisipasi pengurus dan anggota dalam kegiatan belum optimal, tanaman agroforestri belum dikembangkan, dan tidak ada sosialisasi dari pemerintah dalam membuat unit usaha.

**Kata kunci:** kelompok tani hutan, kelembagaan, tata kelola, hutan kemasyarakatan, FFA

**Abstract.** The existence of Forest Farmers Groups is considered very important, because it can increase institutional capacity in community forest management which functions to control and oversee sustainable forest management. One of them is KTH Malacca 01 which has obtained approval for community forest utilization. This study aims to identify the implementation of institutional governance and analyze the driving factors and inhibiting factors for HKm management. This research was conducted from April to May 2022 in the Cenrana Baru village community forest area. Data collection was carried out using interviews, observation, and documentation studies which were then analyzed

*using descriptive analysis. The data obtained were identified through a table of criteria and indicators for assessing governance capabilities, then analyzed using the Force Field Analysis (FFA) and Analysis Hierarchical Process (AHP) methods. The results showed that the implementation of KTH Malacca 01 institutional governance was categorized as not good or it was said that it was still not optimally carried out, this was seen based on three aspects, namely institutional, regional and business management. Factors driving HKm management consist of IUPHKm approval, group management structure, companion knowledge, environmental service potential, supporting infrastructure, and the desire to partner. Inhibiting factors consist of KTH meetings that are not routine, assistants are not active, management and members' participation in activities is not optimal, agroforestry plants have not been developed, and there is no socialization from the government in creating business units*

**Keywords:** *forest farmers group, institutional, governance, community forestry, FFA*

## PENDAHULUAN

Pengelolaan hutan secara lestari bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan hutan tentunya harus didasari pada kebijakan-kebijakan yang berfungsi sebagai mekanisme kebijakan dalam menjalankan proses pengelolaan hutan baik dari segi perencanaan, tata kelola dan pelaksanaan hutan lainnya dalam berbagai konteks (Budi dkk, 2021). Pengelolaan hutan tercermin dalam program Perhutanan Sosial yang terdiri dari lima skema dan salah satunya adalah Hutan Kemasyarakatan (HKm). Kebutuhan masyarakat dalam mengelola kawasan hutan terus menerus diperhatikan agar masyarakat tetap memanfaatkan sumberdaya yang ada dalam kawasan hutan (Permana, 2019). Keterampilan, pengetahuan, dan sikap terbentuk sebagai bagian dari persepsi masyarakat yang dapat mengubah nilai dan pemikiran mereka melalui pengelolaan hutan (Wulandari dkk, 2018). Oleh karena itu, dengan mengacu pada kebijakan pemerintah berupa terbitnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.9/Menlhk//2021 tentang Perhutanan sosial.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.9/Menlhk//2021 tentang Perhutanan sosial menjelaskan bahwa hutan kemasyarakatan (HKm) merupakan kawasan hutan yang kegunaan utamanya bertujuan untuk memberdayakan masyarakat setempat. HKm dapat dilaksanakan baik di hutan lindung maupun hutan produksi. HKm dilakukan sebagai bentuk legalisasi berdasarkan pemanfaatan hutan negara oleh masyarakat. Awalnya masyarakat yang mengelola kawasan hutan secara illegal (perambahan), dibentuk dalam suatu organisasi pengelolaan hutan berupa kelompok tani hutan. (Dewi dkk, 2018).

Kelembagaan sangat penting dalam pengelolaan HKm. Hal tersebut dikarenakan kelembagaan berfungsi mengatur pengelolaan dengan cara mengontrol dan mengawasi pengelolaan sumberdaya agar tetap lestari (Salaka dkk, 2020). Saat ini masih terdapat kendala dalam pengelolaan, maka dasar untuk melaksanakan program HKm adalah dengan adanya kelembagaan Kelompok Tani Hutan (KTH). Berjalannya tata kelola HKm yang baik yaitu melalui sebuah wadah berupa KTH yang merupakan sebuah organisasi yang mengelola kelembagaan dan bersama-sama mengambil bagian dalam penguatan unit-unit usaha (Safe'I dkk, 2018). Namun melihat situasi saat ini,

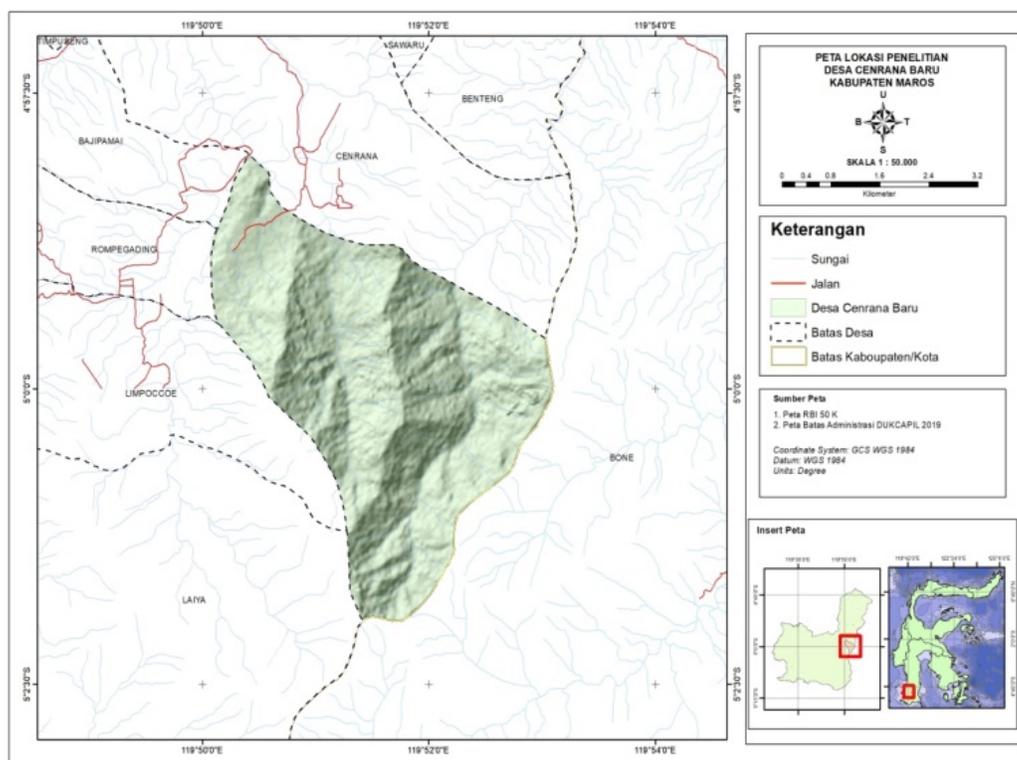
model HKm yang ada di Desa Cenrana Baru memiliki persoalan dari tidak berjalannya kelembagaan seperti kepengurusan dari program belum memahami tugas dan fungsi masing-masing, sebagian anggota KTH belum bisa diarahkan, dan aset kelompok tani masih rendah. Isu-isu tersebut menimbulkan kekhawatiran pengelolaan hutan berbasis masyarakat melalui HKm tidak berkelanjutan. Oleh karena itu untuk menjaga kelestarian hutan, faktor terpenting dalam keberhasilannya dapat dilihat dari fungsi kelembagaan, yang difokuskan pada penilaian tata kelola

kelembagaan, khususnya Kelompok Tani Malaka 01 dalam pengelolaan HKm, penelitian ini juga untuk mengungkap dan menganalisis faktor pendorong dan penghambat pengelolaan HKm.

## METODE PENELITIAN

### Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada kawasan Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Desa Cenrana Baru, Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros pada bulan April hingga Mei 2022.



Gambar 1. Peta lokasi penelitian

### Populasi dan Sampel

Objek dalam penelitian ini terdiri atas Kelompok Tani Hutan. Pemilihan responden dilakukan dengan cara sengaja (*purposive sampling*) dengan kriteria masyarakat tersebut merupakan masyarakat yang tergabung dalam

KTH Malaka 01. Jumlah responden yang dikumpulkan sebanyak 21 orang dari 38 anggota yang tergabung dalam KTH Malaka 01. Jumlah responden yang dipilih merupakan masyarakat yang aktif dan paham tentang tata

kelola kelembagaan yang berlaku pada KTH Malaka 01.

### Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam sebanyak 21 orang. Wawancara mendalam dilakukan dengan menanyakan hal-hal terkait kriteria dan indikator tata kelola kelembagaan yang didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia No. P.5 /P2SDM/ SET/ KUM. 1/ 7/ 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia No. P.4 /P2SDM/ SET/ KUM. 1/ 10/ 2018 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kelas Kelompok Tani Hutan. Data tersebut meliputi aspek kelola kelembagaan, kawasan, dan usaha.

Penilaian berhasil atau tidaknya pelaksanaan tata kelola kelembagaan dilakukan dengan cara sederhana, yaitu mengisi hasil penilaian sesuai dengan total hasil penilaian dan mengisi persentase (%) dengan menggunakan rumus nilai tertinggi: Hasil penilaian  $\times$  100. Dengan menggunakan 3 kategori, yaitu:

- Baik : 81-100 %
- Sedang : 60-80 %
- Tidak baik : < 60 %

### Analisis Data

Setelah diperoleh data terkait keberhasilan pelaksanaan tata kelola kelembagaan pada pengelolaan HKm, selanjutnya dilakukan analisis mengenai faktor pendorong dan penghambat pengelolaan HKm. Pengelolaan data dilakukan dengan metode *Force Field Analysis* (FFA) dan *Analytic Hierarchy Process* (AHP) untuk mstudi pakar (*expert*). Analisis faktor pendorong dan faktor penghambat pengelolaan HKm disajikan dalam tabel. Setelah itu, diidentifikasi kekuatan-kekuatan

yang paling penting melalui matriks perbandingan berpasangan. Penilaian tersebut diberikan kepada ahli atau pakar (*expert*). Selengkapnya tersaji dalam uraian berikut (Saaty, 1993):

- a. Membuat matriks perbandingan berpasangan (*matriks pairwise comparison*) yang dibangun berdasarkan persepsi atau pendapat penilaian dengan membandingkan antar satu faktor dengan faktor lainnya. Dengan menggunakan skala penilaian Saaty, yaitu 1 – 5.
- b. Menormalkan data, yaitu dengan membagi nilai dari setiap faktor di dalam matriks yang perpasangan dengan nilai total setiap kolom
- c. Menghitung nilai eigen vector dan menguji konsistensinya. Jika tidak konsisten, maka pengambilan data (preferensi) perlu diulangi
- d. Menghitung langkah 1,2, dan 3 untuk seluruh tingkat hirarki
- e. Menghitung eigen vector dari setiap matriks perbandingan berpasangan.
- f. Menguji konsistensi hirarki dengan ketentuan sebagai berikut:  
 $CR < 0$ , maka dianggap error  
 $CR = 0$ , maka dianggap sangat konsisten  
 $CR > 0-1$ , maka dianggap tidak konsisten  
 $CR > 1$ , maka dianggap tidak konsisten  
 Jika tidak memenuhi, maka penilaian harus diulang kembali.

Setelah dilakukan uji konsistensi pada setiap pakar dengan metode AHP, selanjutnya dilakukan analisis gabungan seluruh pakar untuk melunturkan subjektivitas dari pakar. Setelah itu, nilai tersebut dikalikan dengan hasil justifikasi peneliti berdasarkan hasil pengamatan di lapangan dengan rentang nilai yang diberikan 1 – 5. Nilai akhir untuk masing-masing kekuatan diperoleh melalui hasil kali antara bobot dan nilai.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Cenrana Baru merupakan salah satu dari 7 desa di wilayah Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. Wilayah Pemerintahan Desa Cenrana Baru terbagi atas 5 dusun yaitu Dusun Malaka, Dusun Tanete, Dusun Arokke, Dusun Matanre, dan Dusun Maccini. Desa Cenrana Baru memiliki wilayah seluas ± 31,13 km<sup>2</sup> dan jumlah penduduk sebanyak 1.788 jiwa serta tingkat kepadatan penduduk sebesar 57 jiwa/km<sup>2</sup>. Adapun jarak dari desa tersebut ke kantor kecamatan 11,50 km, sedangkan jarak dari desa ke ibukota kabupaten sejauh 46,00 km.

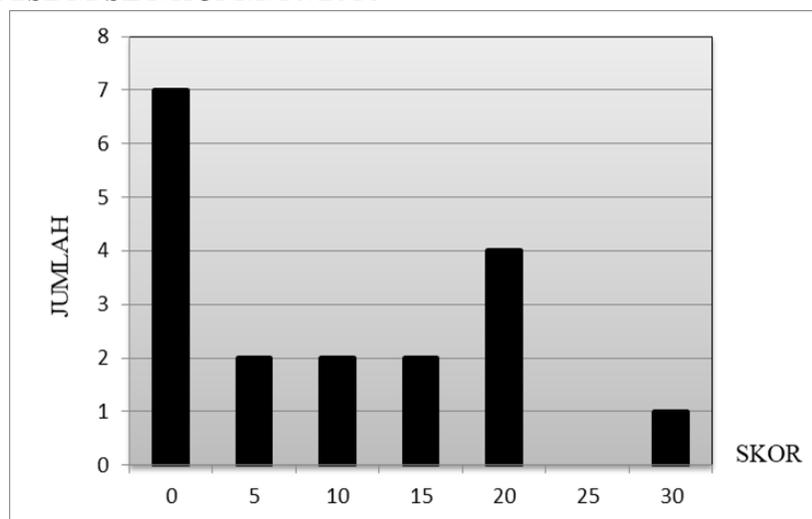
### Identifikasi Pelaksanaan Tata Kelola Kelembagaan dalam Pengelolaan HKM

Sistem kelembagaan pada KTH Malaka 01 dalam mengelola kawasan HKM dapat dilihat berdasarkan Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia No. P.5/P2SDM/SET/KUM.1 /72020 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia NO. 4/P2SDM/SET/KUM.1/10/2018

tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kelompok Tani Hutan. Indikator-indikator dalam penilaian kelas KTH dapat menjadi dasar penilaian kemampuan kelompok dalam menjalankan kelembagaan. Sehingga melalui indikator-indikator tersebut akan diketahui komponen-komponen yang masih menjadi kelemahan kelompok. Pelaksanaan tata kelola kelembagaan dapat dilihat dari 3 aspek yaitu kelola kelembagaan, kelola kawasan, dan kelola usaha.

#### a. Kelola kelembagaan

Kelembagaan adalah bagian penting dari setiap organisasi. Kelembagaan menggambarkan sebagai struktur hubungan dan struktur tatanan yang dapat mengikat satu sama lain (Azizah, dkk., 2021). Dari hasil penilaian kemampuan kelola kelembagaan KTH Malaka 01 mendapatkan nilai 180 dari skor maksimal 360. Artinya bahwa kemampuan kelompok dalam menjalankan kelembagaan sekitar 50%. Hal ini dikarenakan kegiatan kelembagaan pada KTH Malaka 01 belum berjalan sesuai dengan fungsinya, sehingga beberapa indikator belum terpenuhi. Jumlah perolehan nilai dari setiap indikator dapat dilihat pada diagram berikut:



Gambar 2. Jumlah Skor Indikator berdasarkan aspek kelola kelembagaan

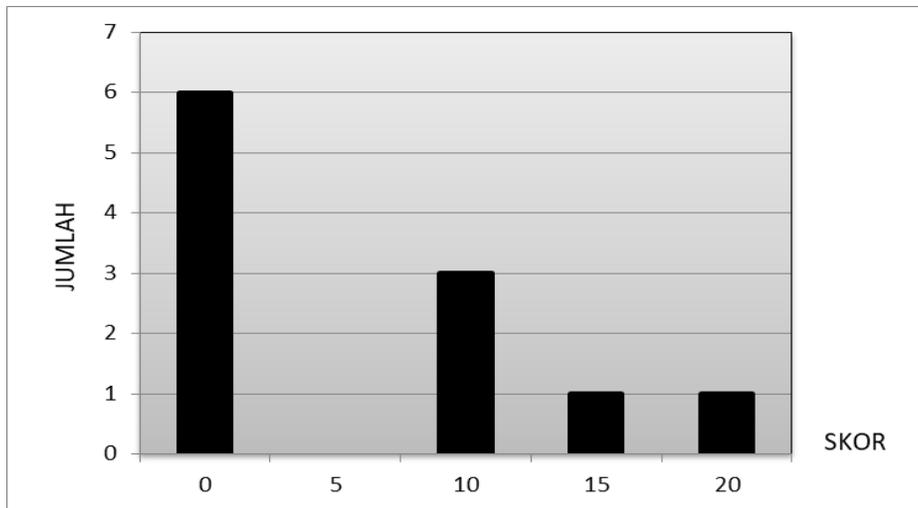
Dari hasil penilaian kemampuan kelola kelembagaan menghasilkan presentase 50% termasuk dalam kategori tidak baik. Dapat dilihat pada gambar 2 indikator dengan skor tertinggi yaitu 30, terkait dengan dasar hukum pendirian KTH berupa Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK. 10431/ MENLHK - PSKL/ PKPS/ PSL.0/ 12/ 2019 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan Kepada Kelompok Tani Hutan Malaka 01 seluas ± 80 Hektar Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap di Desa Cenrana Baru Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan.

Ada 7 indikator yang memperoleh skor terendah yaitu 0 artinya tidak terlaksana, salah satunya adalah belum adanya aturan yang menjelaskan rancangan terselenggaranya kegiatan kelompok. Adanya aturan tertulis (AD/ART) dan tidak tertulis dapat mempengaruhi terlaksananya suatu lembaga. Sejalan dengan penelitian Afriani (2014) mengatakan bahwa masyarakat yang tergabung dalam KTH dapat mengetahui tentang hutan kemasyarakatan, aturan atau kebijakan, dan

sanksi bagi yang melanggar sehingga dapat meningkatkan tanggung jawab pengurus dan anggota dalam menjalankan KTH.

b. *Kelola kawasan*

Kelola kawasan meliputi kegiatan yang difokuskan pada pengelolaan lahan yang digunakan untuk mata pencaharian dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan pengamanan kawasan hutan (Fito dkk, 2020). Anggota yang tergabung dalam KTH Malaka 01 terlibat dalam penyadap getah pinus. Getah pinus sebagai komoditi utama di lahan HKm Malaka. Selain getah pinus terdapat beberapa anggota penyadap yang menanam kopi (*Coffea sp.*), cengkeh (*Syzygium aromaticum*), kemiri (*Aleurites moluccana*), dan coklat (*Theobroma cacao*). Dari hasil penilaian kemampuan kelola kawasan mendapatkan nilai 85 dari skor maksimal 200. Artinya bahwa kemampuan kelompok dalam mengelola kawasan HKm sekitar 42,5%. Hal ini dikarenakan keanggotaan masih belum aktif mengelola kawasan sehingga beberapa indikator belum terpenuhi. Jumlah perolehan nilai dari setiap indikator dapat dilihat pada diagram berikut:



Gambar 3. Jumlah skor indikator berdasarkan aspek kelola kawasan

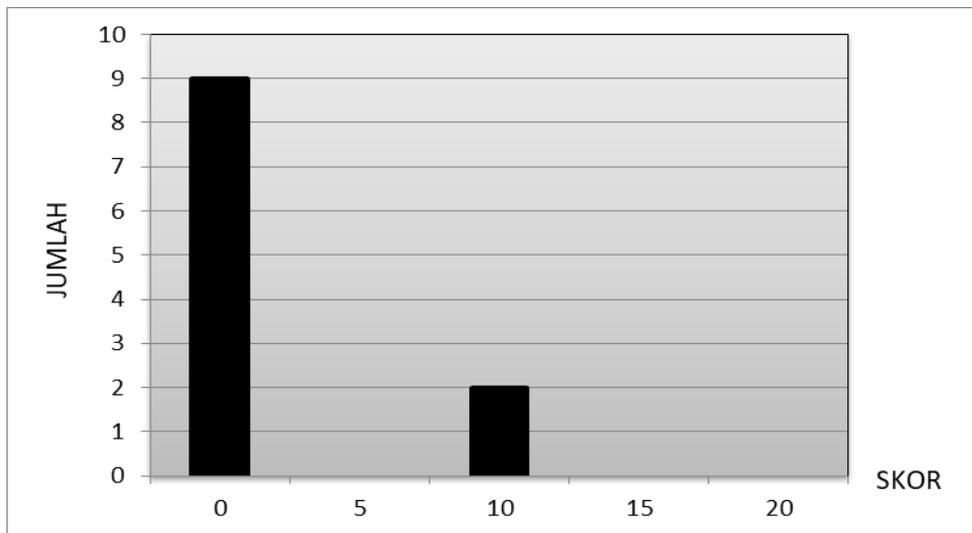
Dari hasil penilaian kemampuan kelola kawasan menghasilkan presentase 42,5% termasuk dalam kategori tidak baik. Indikator dengan skor tertinggi adalah 20 terkait pemahaman anggota terhadap batas-batas wilayah kelola sudah >75% paham, artinya bahwa batas kawasan HKm telah dipahami oleh pengurus dan juga anggota KTH. Sejalan dengan Marasabessy (2017) bahwa dengan adanya batas kawasan membuat wilayah menjadi eksklusif, artinya bahwa pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan menjadi hak masyarakat yang mengklaimnya.

Ada 6 indikator yang memperoleh skor terendah yaitu 0 artinya tidak terlaksana, salah satunya belum ada kelompok yang terbentuk dalam peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap kelestarian hutan dan lingkungan. Hal ini menunjukkan KTH Malaka 01 dalam mengelola kawasan masih belum optimal, dikarenakan terdapat beberapa indikator yang belum pernah dilakukan oleh kelompok. Sejalan dengan penelitian Karim (2017) bahwa kepedulian masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan diperlukan

lembaga yang dapat menghimpun aspirasi masyarakat dalam membina kepedulian sosial untuk menanggulangi ancaman kelestarian lingkungan.

c. *Kelola usaha*

Kelola usaha merupakan upaya untuk menghasilkan pendapatan. Hal ini dapat menjadi sumber pendapatan bagi petani untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari melalui sumber daya yang dimiliki berupa tenaga kerja yang ada di sekitar lingkungan. Untuk menciptakan produk yang berkelanjutan, perlu dilakukan usaha tani (Riane, 2019). Dari hasil penilaian kemampuan kelola usaha, mendapatkan nilai 20 dari skor maksimal 440. Artinya bahwa kemampuan kelompok dalam mengelola usaha hanya sekitar 4,5%. Hal ini menunjukkan bahwa tata kelola usaha belum mampu memenuhi kapasitas kelembagaan KTH Malaka 01, sehingga masih terdapat beberapa indikator yang belum terpenuhi. Jumlah perolehan nilai dari setiap indicator dapat dilihat pada diagram berikut:



Gambar 4. Jumlah skor indikator berdasarkan aspek kelola usaha

Dari hasil penilaian kemampuan kelolausaha menghasilkan presentase hanya sekitar 4,5%. termasuk dalam kategori tidak baik. Dapat dilihat dari diagram diatas hanya terdapat 2 indikator penilaian kelola usaha yang pernah dilakukan oleh kelompok, yaitu indikator dengan skor 10 terkait pola hubungan antara PT Adimitra Pinus Utama (APU) dengan KTH Malaka 01 yang merupakan kemitraan sub kontrak karena didalamnya anggota penyadap yang menjadi buruh tani penyadap getah pinus. Munir (Ketua KTH Malaka 01) mengatakan bahwa perusahaan PT Adimitra Pinus Utama (APU) mendapatkan izin bekerja sama untuk penyadapan getah pinus dari pihak pemegang izin hak Kelola areal HKm, yaitu KTH Malaka 01 dan kewajiban dari perusahaan PT Adimitra Pinus Utama yaitu menyiapkan alat-alat untuk persiapan penyadapan. Indikator selanjutnya yaitu cakupan tujuan hasil produksi getah pinus yang dibawa oleh pihak perusahaan masih pada lingkup kabupaten.

Indikator dengan skor 0 memperoleh jumlah yang paling banyak yaitu 9, berdasarkan hal tersebut, bahwa masih banyak indikator yang belum dicapai salah satunya adalah belum ada jenis usaha yang dihasilkan dari penyadapan getah pinus maupun pemanfaatan yang ada pada areal HKm Pada akhirnya, tidak dapat meningkatkan pendapatan anggota kelompok. Dikarenakan anggota mulai aktif menyadap pada tahun 2021. Munir (Ketua KTH Malaka 01) mengatakan bahwa sebelumnya ada beberapa orang yang diutus oleh perusahaan sebagai petani penyadap yang berasal dari Jawa, ia menyadap getah pinus pada areal HKm selama 5 tahun. Selain permasalahan tersebut sampai sekarang masih sangat sedikit anggota KTH yang paham tentang sistem penyadapan getah pinus. ini dibuktikan dengan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kelola usaha.

Disinilah peran pengurus dibutuhkan dalam pembinaan KTH.

Sejalan dengan penelitian Asmoro, *et.al* (2021) bahwa KTH kurang berdaya memanfaatkan besarnya potensi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) khususnya getah pinus, dikarenakan rendahnya produktivitas dan lemahnya pemasaran. KTH membutuhkan upaya pemberdayaan melalui penyuluhan untuk pendampingan agar dapat lebih optimal dalam mengelola HHBK, meningkatkan peran kepemimpinan kelompok dan kemandirian masyarakat.

#### **Analisis Faktor-Faktor Pendorong (*Driving Force*) dan Penghambat (*Restraining Force*) Pengelolaan HKm**

Setelah diperoleh data terkait penilaian tata kelola kelembagaan, selanjutnya dilakukan analisis mengenai faktor-faktor pendorong dan penghambat pengelolaan HKm yang didasarkan pada indikator penilaian pelaksanaan tata kelola kelembagaan. Kemudian dilakukan identifikasi kekuatan-kekuatan yang paling penting melalui matriks perbandingan berpasangan yang mengacu pada nilai yang diberikan oleh pakar. Jumlah pakar yang diambil sebanyak 4 orang yang dianggap memiliki kapasitas dalam penilaian kelembagaan KTH dalam pengelolaan HKm.

Setelah hasil penilaian setiap pakar dianalisis, selanjutnya dilakukan analisis gabungan seluruh pakar untuk melunturkan subjektivitas dari pakar. Langkah selanjutnya yang dilakukan setelah analisis gabungan adalah mengalikannya dengan hasil justifikasi peneliti berdasarkan hasil pengamatan di lapangan. Rentang nilai yang diberikan yaitu 1 –5. Nilai akhir untuk masing-masing kekuatan diperoleh melalui hasil kali antara bobot dan nilai. Selanjutnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 1. Hasil analisis penilaian faktor pendorong

Aspek	Faktor Pendorong	Bobot	Nilai	Skor
Kelola Kelembagaan	Adanya akses legal berupa IUPHKm	0,03	4	0,12
	Adanya struktur kepengurusan kelompok	0,05	4	0,20
Kelola Kawasan	Dilakukan kegiatan peningkatan kapasitas	0,10	2	0,20
	Adanya pendamping KTH	0,15	4	0,60
	Adanya potensi pemanfaatan jasa lingkungan	0,10	4	0,40
Kelola Usaha	Adanya sarana prasarana yang mendukung dalam pengelolaan HKm	0,11	4	0,44
	Adanya perusahaan bermitra dengan KTH	0,13	4	0,52

Table 2. Hasil analisis penilaian faktor penghambat

Aspek	Faktor Penghambat	Bobot	Nilai	Skor
Kelola Kelembagaan	Kepengurusan KTH belum berjalan sesuai dengan fungsinya	0,05	3	0,15
	Pertemuan KTH tidak rutin	0,08	4	0,32
	Kurang optimalnya keterlibatan anggota dalam pembentukan kelembagaan KTH	0,10	4	0,40
	Pendamping tidak aktif dalam hal memantau kegiatan KTH	0,06	3	0,18
Kelola Kawasan	Kurangnya partisipasi anggota dalam pengelolaan HKm	0,08	4	0,32
	Tanaman agroforestri belum dikembangkan dengan baik	0,25	4	10
Kelola Usaha	Tidak ada unit usaha yang dilakukan KTH	0,10	3	0,30
	Tidak ada sosialisasi dari pemerintah dalam membuat unit usaha	0,23	2	0,46

Berdasarkan data pada Tabel 1 dan 2 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara bobot dan nilai pada masing-masing faktor tiap aspek. Faktor yang memiliki bobot tertinggi pada setiap aspek berarti mempunyai pengaruh yang besar, begitupun dengan nilai yang dimiliki. Faktor yang memiliki nilai dan bobot tertinggi bisa saja memengaruhi faktor lainnya yang memiliki nilai dan bobot yang rendah dalam aspek yang sama. Faktor tersebut bisa diperkuat dan bisa melemahkan faktor menghambat. Sebagai contoh pada aspek kelembagaan, terdapat empat faktor masing-

masing memiliki bobot yang berbeda. Secara berurut terkait dengan adanya pendamping KTH 0,15; adanya kegiatan peningkatan kapasitas 0,10; adanya struktur kepengurusan kelompok 0,05; serta adanya akses legal berupa IUPHKm 0,03. Dari keempat faktor tersebut, yang memiliki skor tertinggi adalah 0,60 terkait adanya pendamping KTH. Hal ini menunjukkan bahwa faktor tersebut memiliki pengaruh yang besar.

Faktor pendorong tertinggi pada Tabel 1 yaitu adanya pendamping KTH (0.15). Hal ini menunjukkan bahwa faktor tersebut memiliki

pengaruh besar dan dianggap sangat penting dalam menjalankan kelembagaan KTH. Upaya peningkatan kapasitas kelembagaan diperlukan peran pendamping dalam pengawalan pelaksanaan kegiatan sedemikian rupa sehingga sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Tenaga pendamping pada KTH Malaka 01 saat ini hanya 1 orang yaitu Rismawati dari KPH yang ditugaskan untuk berkontribusi dan menjalankan perannya sebagai pendamping KTH. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, bahwa pendamping telah berkontribusi dalam membantu kegiatan kelembagaan seperti pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan, baik dari program pemerintah maupun kegiatan kepentingan kelompok.

Sejalan dengan penelitian Juwita, dkk (2017) bahwa salah satu keberhasilan kegiatan kelompok adalah peran pendamping. Hasil analisis menunjukkan bahwa pendamping sangat penting untuk membantu petani dalam meningkatkan pengetahuan. Tenaga pendamping memberikan pelatihan, pendampingan, dan mengevaluasi kegiatan yang diharapkan dapat memberikan pengetahuan sekaligus pembelajaran bagi petani.

Sedangkan untuk faktor penghambat tertinggi pada Tabel 2 yaitu tanaman agroforestri belum dikembangkan dengan baik (0.25). Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, dibawah tegakan pinus terdapat berbagai jenis tanaman agroforestri seperti kopi, kemiri, dan coklat akan tetapi belum bisa dikembangkan dan anggota belum bisa mendapatkan penghasilan dari tanaman tersebut. Hal ini disebabkan adanya gangguan hewan liar yaitu monyet yang mengganggu tanaman sehingga sampai saat ini anggota KTH belum mendapatkan cara agar tanaman yang ada bisa dikembangkan. Faktor ini mempunyai bobot tertinggi yaitu 0.25 dengan nilai 4. Hal ini

dianggap sangat berpengaruh dalam peningkatan pengelolaan HKm.

### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

1. Tata kelola kelembagaan pada KTH Malaka 01 berperan penting dalam keberhasilan pengelolaan HKm agar tetap lestari. Pelaksanaan tata kelola kelembagaan ditentukan berdasarkan aspek kelola kelembagaan, kelola kawasan, dan kelola usaha. Berdasarkan skoring yang diperoleh bahwa Penilaian pelaksanaan tata kelola kelembagaan dari 3 (tiga) aspek tersebut termasuk dalam kategori Tidak Baik atau dikatakan masih belum optimal dilakukan.
2. Dari hasil analisis diperoleh faktor pendorong (*driving forces*) pengelolaan hutan kemasyarakatan berdasarkan keseluruhan aspek secara berurut, yaitu adanya pendamping KTH 0,60; adanya perusahaan yang bermitra dengan KTH 0,52; dan sarana prasarana yang mendukung dalam pengelolaan HKm 0,44. Sedangkan yang mempengaruhi faktor penghambat (*restraining force*) secara berurut, yaitu tidak ada sosialisasi dari pemerintah dalam membuat unit usaha 0,46; kurang optimalnya keterlibatan anggota dalam kegiatan kelembagaan KTH 0,40; serta kurangnya partisipasi anggota dalam pengelolaan HKm 0,32.

### DAFTAR PUSTAKA

- Afriani, I. 2014. Analisis Kelembagaan pada Masyarakat di Kawasan Hutan Kemasyarakatan (HKm) Kabupaten Tanggamus. Kerja sama Konsorsium Kota Agung Utara dan STIPER Dharma Wacana Di Kabupaten Tanggamus.

- Asmoro, H. Sumardjo, Susanto, D., dan Tjitropranoto, P. 2021. *Empowerment Quality Improvement Of Forest Farmer Groups In Non-Timber Forest Products Management*. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*. 18(1), 152.D  
OI: <https://doi.org/10.20886/jpsek.2021.18.1.15-25>
- Budi, Kartodihardji, H., Nugroho, B., Mardiana, R. 2021. *Implementation of Social Forestry Policy: Analysis of Community Access*. *Jurnal Forest and Society*. 5 (1), 60-74. DOI: <https://doi.org/10.24259/FS.V5I1.9859>
- Dewi, I. N., San, A. A., Wahyu. A., dan Priyono, S. 2018. Karakteristik Petani dan Kontribusi Hutan Kemasyarakatan (HKm) Terhadap Pendapatan Petani di Kulon Progo. *Jurnal Ilmu Kehutanan*. 12(1), 86-98.
- Elva, K. H., Febryano, I. G., dan Yuwono, S.Y. 2017. Kajian Kelembagaan Gabungan Kelompok Tani Dalam Program Kemitraan Di Kphp Way Terusan. *Jurnal Hutan Tropis*. 5(1), 1-7.
- Karim, A. 2017. Mengembangkan Kesadaran Melestarikan Lingkungan Hidup berbasis Humanisme Pendidikan Agama. *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*. 12(2).
- Marasabessy, I., Fahrudin, A., Imran, Z., dan Agus, S. B. 2017. Pengelolaan Berkelanjutan Perikanan Demersal Di Kawasan Pulau Nusa Manu Dan Nusa Leun Maluku Tengah. *Jurnal Penelitian Perikanan*. 2(1), 13-27.
- Permana J. 2019. Strategi Keberhasilan Program Hutan Kemasyarakatan Di Kabupaten Pakpak Bharat. Skripsi. Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia.
- Safe'i, R., Febryano, I. G., dan Aminah, L. 2018. Pengaruh keberadaan gabungan kelompok tani terhadap pendapatan petani dan perubahan tutupan lahan di hutan kemasyarakatan. *Jurnal Sosiohumaniora*, 20(2), 109-114.
- Salaka, F. J., Alviya, I., Suryandari, E.Y., Nurfatriani, F., dan Muttaqin, M.Z. 2020. *The Effectiveness Of Local Institutional Arrangement For Community Plantation Forest*. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*. 17 (1), 75-92. DOI: <https://doi.org/10.20886/jakk.2020.17.1.75-92>
- Wulandari, C., Bintoro, A., Rustia, Santoso, T., Duryat, Kasyoko, H., Erwin, dan Budiono., P. 2018. *Community forestry adoption based on multipurpose tree species diversity towards to sustainable forest management in ICEF of University of Lampung, Indonesia*. *Jurnal Biodiversitas*. 19(3), 1102-1109. DOI: <https://doi.org/10.13057/biodiv/d190344>.